



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOHANES BAGYO HARSONO
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 963423

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.190.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/36 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 156 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, Rp. 210.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, Rp. 80.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/155 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **119.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU F700RGTXMT/MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **34.655.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **22.500.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.366.155.000**



III. HUTANG

Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.266.155.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.